

Harapan dan Aspirasi Politik Akar Rumput pada Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Perspektif Sosiologi Politik

Stefanus Nindito

Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

stefanus.nindito@uajy.ac.id

Untuk mengutip artikel ini:

Nindito, Stefanus. (2025). Harapan dan Aspirasi Politik Akar Rumput pada Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Perspektif Sosiologi Politik. *Working Papers Laboratorium Sosiologi FISIP UAJY*, Vol. 11(1), 1-14.

Dalam era transisi politik jelang pelantikan di akhir 2024 menuju pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, harapan masyarakat Indonesia terhadap perubahan dan kemajuan bangsa semakin menguat. Kilas balik 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadi momen penting untuk menilai arah baru politik dan pembangunan Indonesia. Dalam rentang waktu ini, harapan masyarakat terhadap perubahan nyata dan kemajuan bangsa semakin menguat seiring dengan ekspektasi pada program kerja yang diusung pasangan pemimpin baru ini.

Buku kertas kerja ini hadir sebagai kumpulan artikel ilmiah yang mengupas secara kritis aspirasi masyarakat, program kerja, tantangan, serta peluang yang dihadapi pemerintahan baru, dengan menggunakan perspektif dan teori sosiologi politik terkini. Selain itu, buku ini berupaya memberikan pemahaman mendalam berdasarkan aspirasi yang dijangar melalui wawancara langsung dengan berbagai profesi oleh mahasiswa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FISIP UAJY), khususnya peserta mata kuliah Sosiologi Politik. Buku kerja penelitian sosiologi politik ini hadir sebagai refleksi kritis atas dinamika, tantangan, dan peluang yang mewarnai awal pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan menyoroti berbagai aspek melalui lensa teori sosiologi politik kontemporer.

Para mahasiswa Sosiologi FISIP UAJY melalui perkuliahan Sosiologi Politik mengasah ketajaman keterampilan akademisnya melalui berbagai kegiatan akademis baik di dalam maupun di luar kelas. Pada lingkup kelas Sosiologi Politik mahasiswa digembleng untuk selalu berpikir kritis mempertanyakan segala sesuatu yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan yang terkait dengan kekuasaan (politik) di sekitarnya melalui aktivitas membaca, merespon materi, diskusi, debat yang seru dan panjang untuk mengasah keterampilan melakukan penggalian dan analisis dalam kerja

akademik. Secara khusus, dalam kesempatan ini aktivitas mereka adalah berupa penelitian tentang aspirasi masyarakat yang terkait dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi jelang pemerintahan Prabowo-Gibran yang berupaya membentuk arah Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan kerja akademik panjang yang sangat intens dan fokus maka dihasilkanlah karya tulis ilmiah yang bertitik tolak dari 5 pertanyaan besar mengenai harapan dan aspirasi dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat akar rumput di lapisan bawah, seperti tukang becak, pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, barista, dan para mahasiswa yang dianggap mampu mengekstraksi aspirasi kepentingan dan harapan masyarakat.

Pertanyaan pertama dari mini survei ini adalah tentang harapan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di bawah batas kesejahteraan, terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Harapan dan aspirasi mereka mengarah pada keberlanjutan pembangunan yang inklusif, penguatan persatuan, serta peningkatan kualitas hidup rakyat. Aspirasi dan harapan ini tercermin dalam berbagai survei dan diskursus publik yang menyoroti pentingnya kesinambungan program pembangunan, transformasi digital, serta pemerataan ekonomi dan pendidikan. Dalam konteks sosiologi politik, harapan masyarakat tidak hanya berakar pada kebutuhan material, tetapi juga pada keinginan untuk melihat perubahan struktural yang mampu mengatasi ketimpangan sosial dan memperkuat kohesi nasional.

Masyarakat melalui mini survei ini menaruh harapan besar pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan pembangunan, memperkuat persatuan, dan meningkatkan kesejahteraan, tanpa membebani masyarakat kecil dengan berbagai komponen pajak dan jarak kesejahteraan yang semakin jauh dengan para elit pengelola negeri seperti anggota DPR RI, Menteri, Hakim Tinggi Hakim Mahkamah Konstitusi, Direktur dan Komisaris BUMN Pemerintah.

Program kerja utama yang diusung, seperti digitalisasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur strategis, serta pemberdayaan ekonomi lokal, menjadi fondasi untuk mewujudkan efisiensi layanan publik dan pemerataan pembangunan. Strategi komunikasi yang inovatif, termasuk penggunaan media sosial dan pendekatan kreatif, terbukti efektif dalam menarik partisipasi generasi muda dan membangun citra positif di mata publik. Walaupun terkadang memunculkan peluang *blunder* dalam pengelolaan digitalisasi di mana judi Online masih merajalela dan justru masih dilindungi oleh aparat pemerintah sendiri. Kasus kriminal yang digelar perkarakan oleh Polres Sleman tentang Kasus Penangkapan Pembobol Situs Judi Online memunculkan pertanyaan besar di benak masyarakat betapa carut-marutnya pelaksanaan kebijakan di berbagai lini, khususnya dalam hal penegakan hukum.

Kemudian, pertanyaan kedua untuk penggalian data selanjutnya adalah perihal program kerja ke depan Prabowo-Gibran. Pemerintahan Prabowo-Gibran menonjolkan sejumlah program unggulan, seperti digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, pembangunan infrastruktur strategis, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Program-program ini dirancang untuk menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi, sekaligus memperkuat daya saing bangsa. Namun, keberhasilan implementasi program kerja tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia, memperkuat tata kelola, dan memastikan partisipasi masyarakat secara aktif.

Meski program kerja yang ditawarkan menjanjikan, tantangan besar tetap menghadang. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan sumber daya manusia, serta resistensi terhadap perubahan menjadi isu utama yang harus diatasi. Ironisnya resistensi justru terdapat pada lingkaran elit pemerintahan seperti menteri dan para pengambil kebijakan pada level daerah seperti bupati, sekretaris daerah, dan kepala dinas di daerah di Indonesia. Kebijakan yang diambil dianggap tidak berempati pada himpitan kesulitan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal lebih tragis lagi adalah munculnya banyak *blunder* kebijakan yang merepresi kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan pajak dan potongan-potongan pada penghasilan pada masyarakat kelas bawah.

Selain itu, program-program seperti pemindahan ibu kota dan hilirisasi industri memerlukan perencanaan matang agar tidak menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang merugikan. Dalam perspektif sosiologi politik kritis, tantangan ini menuntut kebijakan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis keadilan sosial.

Pertanyaan ketiga dari mini survei sosiologi politik ini adalah tantangan utama yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran. Temuan datanya meliputi ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan sumber daya manusia, serta resistensi terhadap perubahan, terutama dalam proses digitalisasi dan pemindahan ibu kota negara. Selain itu, dinamika politik dan ekspektasi publik yang tinggi menuntut pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan cepat dan responsif terhadap isu-isu strategis, seperti keberlanjutan hilirisasi industri dan penguatan ekonomi nasional. Dalam perspektif sosiologi politik kritis, tantangan ini harus dihadapi dengan kebijakan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis pada keadilan sosial.

Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan tentang visi Indonesia Emas 2045 sebagai peta jalan bagi pemerintahan baru untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong inovasi, memperkuat institusi, serta menjaga stabilitas politik dan sosial. Mini survei ini kemudian menyoroti pentingnya transformasi sosial dan politik yang berkelanjutan,

serta perlunya evaluasi kritis terhadap program-program yang telah berjalan agar dapat diperbaiki dan diteruskan secara efektif.

Tercapainya visi Indonesia Emas 2045 menjadi harapan masyarakat dan pemerintahan baru untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan berdaya saing. Upaya untuk mencapainya diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, serta evaluasi kritis terhadap program-program yang telah berjalan. Program yang efektif perlu diteruskan, sementara yang belum optimal harus diperbaiki dengan pendekatan berbasis data dan riset ilmiah, serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan dinamika politik yang berkembang. Buku ini mengajak pembaca untuk merefleksikan perjalanan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus menawarkan analisis kritis dan solusi konstruktif demi tercapainya tujuan bangsa menuju Indonesia Emas.

Pertanyaan terakhir yang tidak kalah penting adalah tentang evaluasi terhadap program kerja pemerintahan sebelumnya yang kemudian menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek pemerataan pembangunan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan transparansi tata kelola. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan mampu melanjutkan program-program yang telah terbukti efektif, sekaligus melakukan inovasi kebijakan berbasis data dan riset ilmiah. Dengan pendekatan sosiologi politik kritis, buku ini mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh bagaimana kebijakan publik dapat menjadi instrumen perubahan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pengemudi ojek online merupakan salah satu subjek dari mini survei ini. Harapan akan munculnya kebijakan tentang komposisi tarif jasa transportasi yang berpihak pada *wong cilik* yaitu pengemudi ojek online pada awal pemerintahan Prabowo-Gibran sangat besar. Perbaikan kesejahteraan rakyat kecil yang menantikan keputusan pemberlakuan tarif jasa transportasi *online* pada era pemerintahan Prabowo pada 2025 menjadi isu strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat akar rumput. Hal ini khususnya terkait dengan para mitra kerja transportasi umum berbasis virtual atau yang dikenal sebagai pengemudi ojek online.

Perekonomian nasional saat ini sedang dipenuhi oleh berbagai kendala dan tantangan. Pemerintahan Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembangunan ekonomi berdasarkan sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial dan ekonomi. Kebijakan pemerintah saat ini sampai pertengahan semester 2025 menerapkan kebijakan fiskal yang selektif, yakni penyesuaian pajak dan subsidi yang diarahkan untuk melindungi kelompok berpendapatan rendah. Arah kebijakan pemerintah ini tercermin dalam strategi komunikasi politik yang deliberatif. Kebijakan sosial ekonomi pertengahan 2025 yang bersifat deliberatif ini menempatkan pemerintah sebagai pemungut kepercayaan publik. Dengan kata lain, pemerintah saat ini melalui

kebijakannya berupaya membangun kepercayaan publik dan mengurangi resistensi melalui retorika yang menekankan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun, penerapan kebijakan yang berdampak langsung pada penghasilan pengemudi ojek online kerap memicu respons kolektif dari komunitas akar rumput.

Dalam menganalisis partisipasi politik pengemudi ojek online, teori Robert Putnam tentang modal sosial menjadi relevan. Putnam menyoroti pentingnya jaringan, norma, dan kepercayaan dalam memperkuat partisipasi warga negara. Komunitas pengemudi ojek online membangun solidaritas melalui asosiasi, *basecamp*, dan forum daring, yang berfungsi sebagai wadah advokasi dan negosiasi terhadap kebijakan pemerintah maupun pemilik platform. Modal sosial yang terbentuk memungkinkan mereka melakukan resistensi, advokasi, hingga aksi kolektif untuk memperjuangkan tarif yang adil dan perlindungan kerja. Partisipasi ini tidak selalu formal, melainkan seringkali bersifat informal dan berbasis komunitas, mencerminkan bentuk baru partisipasi politik di era digital.

Pemerintah Prabowo, di sisi lain, menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan pemenuhan janji populis, seperti subsidi dan perlindungan sosial. Penyesuaian kebijakan, termasuk tarif transportasi online, harus mempertimbangkan aspirasi dan tekanan dari kelompok akar rumput agar tidak menimbulkan ketidakpuasan sosial yang meluas. Dalam konteks ini, efektivitas komunikasi politik dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

Selanjutnya analisis partisipasi politik pengemudi ojek online melalui lensa Putnam menyoroti pentingnya modal sosial dan keterlibatan komunitas dalam memengaruhi kebijakan publik, serta menegaskan perlunya dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat akar rumput demi terciptanya kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

Sosialisasi politik merupakan proses penting dalam pembentukan sikap, nilai, dan perilaku politik individu maupun kelompok dalam masyarakat. Di Indonesia, tukang becak sebagai bagian dari masyarakat akar rumput memiliki peran unik dalam dinamika politik lokal, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah. Kelompok ini sering kali dipandang sebagai representasi masyarakat marginal yang rentan terhadap perubahan kebijakan dan dinamika politik, namun tetap memiliki potensi besar dalam membentuk opini dan perilaku politik di tingkat akar rumput.

Gagasan ideal berupa teori tentang sosialisasi politik yang dikembangkan oleh Michael Rush dan Philip Althoff menekankan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, sikap, dan orientasi politik melalui interaksi dengan berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, kelompok sebaya, media massa, dan institusi politik. Dalam konteks tukang becak, proses sosialisasi

politik berlangsung secara informal melalui interaksi sehari-hari di pangkalan, diskusi dengan sesama tukang becak, serta paparan terhadap media massa dan kebijakan pemerintah setempat. Agen-agen ini membentuk persepsi tukang becak terhadap pemerintah, kebijakan publik, dan hak-hak politik mereka.

Rush dan Althoff juga menyoroti pentingnya pengalaman langsung dan lingkungan sosial dalam membentuk orientasi politik. Tukang becak, yang sering berhadapan langsung dengan kebijakan pemerintah seperti penataan kota, relokasi, atau aturan transportasi, mengalami proses sosialisasi politik yang khas. Pengalaman-pengalaman ini dapat menumbuhkan sikap kritis, solidaritas kelompok, dan bahkan partisipasi politik, baik dalam bentuk dukungan maupun resistensi terhadap kebijakan pemerintah.

Hal lain yang menjadi komponen penting dalam membahas berdasarkan konsep sosiologi politik adalah media massa dan media sosial kini menjadi agen sosialisasi politik yang semakin berpengaruh, memperluas akses informasi dan membentuk opini politik tukang becak secara lebih dinamis. Dalam era digital, tukang becak tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang mampu menyuarakan aspirasi dan kepentingan politiknya melalui berbagai saluran komunikasi.

Penggunaan gagasan pemikiran sosialisasi politik Rush dan Althoff yang dilakukan oleh mahasiswa kelas sosiologi politik dalam makalah ini adalah dengan menganalisis bagaimana proses sosialisasi politik kebijakan pemerintah bersinggungan dan berlangsung pada kalangan tukang becak. Pemahaman ini penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) merupakan momen penting dalam demokrasi yang tidak hanya merefleksikan preferensi politik masyarakat, tetapi juga memperlihatkan dinamika kelas sosial di tingkat akar rumput. Juru parkir, sebagai bagian dari kelas pekerja informal, sering kali diposisikan di pinggiran wacana politik arus utama. Namun, dalam konteks sosiologi politik, kelompok ini justru menawarkan perspektif unik tentang bagaimana kelas sosial memengaruhi perilaku politik, partisipasi, dan pilihan dalam pemilu.

Teori kelas sosial dalam sosiologi politik menyoroti bahwa posisi seseorang dalam struktur sosial—berdasarkan pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan—berperan penting dalam membentuk orientasi politik dan perilaku memilih. Penelitian tentang kelas sosial di Amerika Serikat menunjukkan bahwa hampir semua tidak hanya memengaruhi pilihan kandidat, tetapi juga tingkat partisipasi dalam pemilu. Individu dengan status kelas yang lebih rendah cenderung memiliki kecenderungan politik yang berbeda dibandingkan kelas menengah atau atas, baik dalam hal preferensi kandidat maupun isu yang dianggap penting.

Selain itu, penelitian sosiologi politik ini secara mengagumkan mampu mengakomodasi persepsi subjektif tentang kelas sosial juga dapat memengaruhi perilaku memilih, di mana Selain itu, persepsi subjektif tentang kelas sosial juga dapat memengaruhi perilaku memilih, di mana identitas kelas yang dirasakan tidak selalu sejalan dengan posisi kelas objektif. Dalam konteks juru parkir di Indonesia, faktor-faktor seperti ketidakamanan ekonomi, akses terbatas terhadap pendidikan, dan pengalaman langsung dengan kebijakan pemerintah menjadi penentu utama dalam membentuk sikap politik mereka. Isu-isu seperti perlindungan sosial, upah layak, dan kebijakan transportasi menjadi perhatian utama yang memengaruhi pilihan politik kelompok ini. Studi tentang kelas pekerja di negara lain menunjukkan bahwa sentimen ketidakpuasan terhadap pemerintah, kekhawatiran ekonomi, dan rasa kurang didengar dapat mendorong dukungan terhadap kandidat yang menawarkan perubahan atau retorika populis

Dengan demikian, analisis teori kelas sosial dalam sosiologi politik sangat relevan untuk memahami perilaku politik juru parkir dalam pemilu capres-cawapres. Pendekatan ini membantu mengungkap bagaimana struktur dan identitas kelas membentuk preferensi politik, serta bagaimana kelompok pekerja informal seperti juru parkir dapat menjadi aktor penting dalam proses demokrasi, terutama ketika suara mereka mulai diperhitungkan dalam strategi politik nasional.

Pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pilar utama demokrasi. Tonggak struktur politik utama yang tidak hanya menentukan arah kepemimpinan nasional. Hal substansial lainnya, apabila berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, pemilu menjadi hasil refleksi dinamika politik di tengah masyarakat. Civitas akademika dalam lingkup perguruan tinggi, khususnya para mahasiswa yang tergabung dalam lembaga kemahasiswaan, memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual muda yang kerap menjadi barometer perubahan sosial dan politik. Dalam beberapa dekade terakhir, peran mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan mengkritisi proses politik semakin menonjol, terutama di tengah tantangan era digital dan derasnya arus informasi.

Gagasan dan pandangan kritis mahasiswa terhadap pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia ke depan tidak lepas dari pengalaman mereka dalam menghadapi berbagai problematika demokrasi, seperti praktik politik uang, polarisasi, serta maraknya disinformasi di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung memiliki perilaku politik yang rasional dan kritis, dipengaruhi oleh lingkungan kampus yang mendorong diskusi terbuka dan pendidikan politik.

Partisipasi dalam organisasi kemahasiswaan juga memperkuat literasi politik dan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Namun, tantangan baru muncul seiring dengan meningkatnya pengaruh budaya digital, yang di

satu sisi memperluas akses informasi, namun di sisi lain juga membawa risiko manipulasi opini publik dan penyebaran *hoaks*.

Mahasiswa anggota lembaga mahasiswa memandang pemilu sebagai ajang penting untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi substantif, bukan sekadar prosedural. Mereka menyoroti perlunya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahapan pemilu, serta menuntut agar suara generasi muda lebih didengar dalam perumusan kebijakan publik.

Mahasiswa anggota lembaga kemahasiswaan memandang pemilu sebagai ajang penting untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi substantif, bukan sekadar prosedural. Mereka menyoroti perlunya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahapan pemilu, serta menuntut agar suara generasi muda lebih didengar dalam perumusan kebijakan publik.

Hal lain yang menjadi agenda penting dalam perspektif mahasiswa adalah efektivitas pendidikan politik berbasis media sosial menjadi perhatian utama, mengingat generasi muda sangat rentan terhadap narasi emosional dan isu-isu yang viral. Oleh karena itu, penguatan *civic literacy* dan pendidikan politik yang kritis menjadi agenda penting bagi lembaga mahasiswa dalam menghadapi pemilu mendatang.

Gagasan selanjutnya yang dapat disimpulkan secara singkat adalah perspektif kritis mahasiswa anggota lembaga mahasiswa terhadap dinamika politik dan pemilu Indonesia ke depan menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan berintegritas.

Pesta demokrasi yang hadir berupa pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang menuntut partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok pekerja informal seperti barista. Di Yogyakarta, barista tidak hanya berperan sebagai penyaji kopi, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas urban yang dinamis dan memiliki potensi besar dalam membentuk opini serta perilaku politik. Fenomena *coffee shop* yang menjamur di kota ini telah menciptakan ruang-ruang publik baru, di mana diskusi politik, pertukaran informasi, dan pembentukan identitas sosial berlangsung secara informal dan egaliter.

Ruang segregasi sosial yang berupa kedai kopi di Yogyakarta, merupakan gejala sosial yang menarik ketika ditemukan dalam studi tentang warung kopi Aceh di kota ini, berfungsi sebagai arena diskusi politik yang bebas dan otonom. Melalui interaksi sehari-hari di *coffee shop*, para barista dan pelanggan terlibat dalam percakapan yang tidak hanya membahas isu-isu keseharian, tetapi juga dinamika politik lokal dan nasional. Budaya minum kopi yang kental dengan nuansa kolektif

dan egaliter ini memperkuat kohesi sosial serta mendorong partisipasi politik melalui diskusi informal, kritik, dan dukungan terhadap isu-isu politik tertentu. Dengan demikian, *coffee shop* menjadi model ruang publik baru yang memperkuat hubungan antara komunikasi informal dan partisipasi politik di tingkat akar rumput.

Strategi komunikasi politik yang efektif sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Studi di Yogyakarta menunjukkan bahwa komunikasi strategis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), mampu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis komunitas. Faktor-faktor seperti sikap, pengalaman kerja, rekam jejak, dan tingkat pendidikan juga terbukti memengaruhi partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih muda yang banyak bekerja di sektor informal seperti barista.

Dengan melihat dinamika ini, makalah ini akan mengkaji bagaimana komunikasi dan partisipasi politik berlangsung di kalangan barista Yogyakarta dalam konteks pemilu di Indonesia. Analisis akan difokuskan pada peran *coffee shop* sebagai ruang publik, strategi komunikasi yang efektif, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik barista. Pemahaman ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi partisipasi politik yang lebih inklusif dan relevan dengan realitas sosial masyarakat urban masa kini.

Hajatan besar rakyat dalam berdemokrasi yaitu pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi, di mana seluruh lapisan masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif, termasuk kelompok pedagang kaki lima (PKL) di Yogyakarta. Sebagai bagian dari sektor informal, PKL memiliki posisi unik dalam lanskap politik dan sosial kota. Aspirasi mereka terhadap pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh dinamika sosial, kebijakan publik, serta relasi kekuasaan yang berkembang di masyarakat.

Berangkat dari perspektif teori pilihan rasional perilaku politik PKL dalam pemilu dapat dipahami sebagai hasil pertimbangan untung-rugi yang rasional. Pedagang kaki lima cenderung mendukung kandidat atau partai yang menawarkan insentif konkret, seperti perlindungan usaha, kemudahan perizinan, atau janji-janji kebijakan yang menguntungkan posisi mereka. Studi tentang perilaku pemilih di Indonesia menunjukkan bahwa keputusan politik sering kali didasarkan pada kalkulasi rasional terkait insentif dan hambatan yang dihadapi. Dalam konteks PKL, dukungan politik dapat diberikan sebagai imbal balik atas janji perlindungan atau akses terhadap sumber daya ekonomi.

Gagasan lain yang ditawarkan oleh tulisan terakhir ini adalah teori struktural fungsional yang menyoroti pentingnya peran PKL dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi kota. Pedagang kaki lima tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Aspirasi mereka terhadap

pemilu sering kali berkaitan dengan harapan akan terciptanya tatanan sosial yang stabil, di mana peran mereka diakui dan dilindungi oleh negara. Komunikasi intensif antara pemerintah dan PKL, serta upaya membangun konsensus, menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik yang menyangkut PKL.

Analisis dari sudut pandang teori konflik juga bisa diterapkan. Aspirasi PKL dalam pemilu dipengaruhi oleh relasi kuasa dan potensi ketegangan antara kelompok marginal dan otoritas. Kelompok PKL kerap menghadapi kebijakan yang dianggap merugikan, seperti relokasi atau penertiban, sehingga pemilu menjadi ajang untuk memperjuangkan kepentingan dan menegosiasikan posisi tawar mereka. Organisasi PKL di Yogyakarta, misal, sering memanfaatkan momen pemilu untuk menekan pemerintah agar mengakomodasi aspirasi mereka melalui kontrak politik atau dukungan elektoral.

Selanjutnya, penggunaan teori kebijakan publik dalam makalah terakhir ini menekankan pentingnya komunikasi, opini publik, dan konsensus dalam merumuskan kebijakan yang adil bagi PKL. Keberhasilan kebijakan relokasi atau pemberdayaan PKL sangat bergantung pada pengakuan terhadap budaya lokal, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan PKL dalam proses pengambilan keputusan. Aspirasi PKL terhadap pemilu sering kali terkait dengan harapan akan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Terakhir, makalah ini menggunakan teori legitimasi Max Weber. Kesamaan dukungan PKL dan suara akar rumput yang lain terhadap kandidat atau pemerintah sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap legitimasi otoritas. Kelompok PKL cenderung mendukung pemimpin yang dianggap sah, adil, dan mampu memenuhi aspirasi mereka secara nyata. Legitimasi ini diperkuat melalui interaksi langsung, komunikasi intensif, dan pemenuhan janji politik selama masa kampanye.

Dengan demikian, aspirasi PKL Yogyakarta terhadap pemilu Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara kalkulasi rasional, fungsi sosial, dinamika konflik, proses kebijakan publik, dan pencarian legitimasi politik. Pemahaman multidimensional ini penting untuk merumuskan strategi partisipasi politik dan kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif bagi kelompok marginal di perkotaan.

Tinjauan di atas dimaksudkan untuk mengantarkan para pembaca sekalian untuk lebih detail membaca artikel-artikel yang telah ditulis oleh para mahasiswa peserta mata kuliah Sosiologi Politik, Program Studi Sosiologi UAJY. Artikel-artikel tersebut dikumpulkan dalam rangka membumikan kajian sosiologi politik dalam konteks Indonesia kontemporer, khususnya dengan merekam harapan dan aspirasi politik masyarakat akar rumput yang kerap terpinggirkan oleh wacana arus utama. Dengan demikian, semoga Working Papers ini menjadi kontribusi intelektual yang

penting bagi upaya kita bersama untuk merawat demokrasi dan memperkuat partisipasi politik yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Hakam, K., , W., & , R. (2021). Building student's political behaviour in the context of election in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 747. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/747/1/012096>.
- Alkhajar, E., & Luthfia, A. (2021). Mass Media and Public Policy: Public Perception of Street Vendors in the Media. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i8.3047>.
- Astari, I. (2025). Analisis Framing Tayangan Kampanye Prabowo Gibran pada Program Prabowo Gibran Memang Istimewa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v25i1.5814>.
- Budhyatma, E., & Pribadi, U. (2024). Factors Influencing Young Voters' Political Participation in the 2020 Regional Elections in Yogyakarta. *International Journal of Social Science and Business*. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v8i2.49452>.
- Burhan, A., & Sejati, S. (2024). Joko Widodo sebagai Faktor Penentu Pilpres 2024 dalam Kemenangan Paslon 02 Prabowo-Gibran. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*. <https://doi.org/10.55352/uq.v19i1.856>.
- Djumadin, Z. (2021). Student Political Participation and the Future of Democracy in Indonesia. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.1438>.
- Elfandari, S. (2024). Influence of Political Advertising Effectiveness on the Perspectives of Young Voters in the 2024 Indonesian Election. *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v15i2.3543>.
- F., Efendi, D., Taufik, A., & Sulaksono, T. (2019). ACEHNESE COFFEE SHOPS AS PUBLIC SPACES: ACEH POLITICAL PARTICIPATION MODEL IN YOGYAKARTA. *Humanities & Social Sciences Reviews*. <https://doi.org/10.18510/HSSR.2018.632>.
- Fernando, H., Larasati, Y., Abdullah, I., Saka, P., Hendri, M., & Morin, L. (2024). The Abstention of Urban Students Preference in Indonesian Election 2024. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.15575/politicon.v6i1.33714>.
- Gibbings, S., Lazuardi, E., & Prawirosusanto, K. (2017). Mobilizing the Masses: Street Vendors, Political Contracts, and the Role of Mediators in Yogyakarta, Indonesia. , 173, 242-272. <https://doi.org/10.1163/22134379-17301004>.

- Habir, M., & Negara, S. (2025). Prabowo's First 100 Days and beyond as President: A Security-Focused Economic Agenda. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 61, 3 - 37. <https://doi.org/10.1080/00074918.2025.2483310>.
- Laurison, D., Brown, H., & Rastogi, A. (2021). Voting Intersections: Race, Class, and Participation in Presidential Elections in the United States 2008–2016. *Sociological Perspectives*, 65, 768 - 789. <https://doi.org/10.1177/07311214211059136>.
- Mani, La (2020). CULTURAL DIMENSIONS, COMMUNICATION, PUBLIC OPINION, AND CONSENSUS: A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF STREET VENDOR RELOCATION POLICY IN YOGYAKARTA CITY, INDONESIA. *Humanities and social sciences*, 8, 463-472. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8445>.
- Maulana, R., & Bainus, A. (2022). Penggalangan Civic Literacy Melalui Organisasi Kemahasiswaan dan Pandangan mengenai Tantangan Demokrasi di Indonesia. *DEMOKRASI*. <https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i3.647>.
- Morgan, S., & Lee, J. (2017). The White Working Class and Voter Turnout in U.S. Presidential Elections, 2004 to 2016. *Sociological Science*, 4, 656-685. <https://doi.org/10.15195/V4.A27>.
- Rahmawati, N., Prasetyo, S., & Ramadhani, M. (2024). Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Prespektif Pembangunan. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.176>.
- Rush, M., & Althoff, P. (1971). *An Introduction to Political Sociology*. London: Nelson.
- Sosnaud, B., Brady, D., & Frenk, S. (2013). Class in Name Only: Subjective Class Identity, Objective Class Position, and Vote Choice in American Presidential Elections. *Social Problems*, 60, 81-99. <https://doi.org/10.1525/SP.2013.60.1.81>.
- Sutrisno, A. (2024). An Ideational Metafunction Analysis of Indonesian Presidential Candidate Speeches. *Journal on Education*. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5845>.
- Saifullah, A., & Muskin, N. (2025). Analysis of Prabowo's Speech in the Dynamics of the 12 Percent VAT Policy. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i4.1605>.
- Thawley, C., Crystallin, M., & Verico, K. (2024). Towards a Higher Growth Path for Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60, 247 - 282. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2432035>.

- Satriawan, B., Haridison, A., Sandi, J., Iskandar, D., Utami, P., Irwan, A., & Hartaman, N. (2025). Politainment in the 2024 Indonesian presidential election and positioning in downstream industry. *Frontiers in Political Science*. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1494578>.
- Sosnaud, B., Brady, D., & Frenk, S. (2013). Class in Name Only: Subjective Class Identity, Objective Class Position, and Vote Choice in American Presidential Elections. *Social Problems*, 60, 81-99. <https://doi.org/10.1525/SP.2013.60.1.81>.
- Suhita, D., Arlinda, S., & Nugraheni, J. (2025). Analysis of Max Weber's Perspective on the Dynamics of First-Time Voter Participation in the 2024 Presidential Election (A Case Study on Students of the Faculty of Social and Political Sciences, Slamet Riyadi University). *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i1-54>.
- Widaningtias, A. (2017). STRATEGI KOMUNIKASI DALAM USAHA MENINGKATKANPARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA 2017(Studi Deskriptif Kualitatif Pada KPU Kota Yogyakarta diKecamatan Umbulharjo).
- Zingher, J. (2020). On the measurement of social class and its role in shaping white vote choice in the 2016 U.S. presidential election. *Electoral Studies*, 64, 102119. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102119>.

